

# **MONITORING & EVALUASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716,  
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397

Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

Rapat : Monitoring & Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024  
Hari/Tanggal : Jumat, 26 April 2024  
Surat Undangan : 900/84/SETDA/PERKEU Tanggal 23 April 2024  
Waktu Rapat : 08:45 WIB – 11:30  
Acara : Monitoring & Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024  
Pimpinan Rapat : Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M.  
Ketua : Ir. ISTIWA, M.Si  
Sekretaris : NICOLAUS PURWANTO, S.IP..  
Pencatat : NICOLAUS PURWANTO, S.IP.  
Peserta Rapat : Daftar Terlampir

Adapun hasil rapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah**

Rapat dibuka dengan pengantar dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Triwulan I Tahun 2024 pada tabel dibawah ini:

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
4.01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	BB	Predikat	B	87,50	16,97	12,20
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten	3,3	Nilai	0	0		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	80,8	Nilai	0	0		

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Kita lihat Bersama bahwa IKU kita yang merupakan penilaian terhadap saya sebagai Kepala OPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini terlihat menjadi sangat lemah .Tapi ini memang masih terlalu dini untuk mengeluarkan nilai LPPD dan IKM kita, begitu juga sebenarnya dengan Nilai SAKIP kita memang masih 0 juga sebenarnya. Karena ini menggunakan nilai Tahun 2022 karena tahun 2023 saya rasa akan dikeluarkan oleh Inspektorat di Triwulan II nanti.

**A. Predikat SAKIP**

SAKIP kita tahun lalu 2022 itu Nilai nya CC jadi mohon menjadi perhatian kita semua, saat ini pihak evaluator sudah sering meminta data kebagian Perencanaan sepertinya kita semua sudah maksimal dan semoga tahun ini kita bisa naik secara bertahap. Namun kalau dari target kita untuk tahun ini BB itu sangat berat sebenarnya. Tapi saya yakin apabila kita selalu bekerja sama maka hal itu tentu dapat kita raih.

**B. LPPD**

Nah berbicara LPPD ini saya agak sedikit bingung sebenarnya karena nilai ini kan yang mengeluarkan nilainya dari Kementerian. Tapi tidak apa kita tunggu saja nilainya karena yang pasti bagian Pemerintahan sudah sangat bekerja keras meminta data dan mendorong seluruh OPD untuk memenuhi data pada indikator LPPD.

**C. IKM**

Indeks Kepuasan Masyarakat ini memang belum keluar nilainya oleh bagian Perencanaan dan Keuangan karena memang Nilai di hitung setiap semester. Jadi nanti nilai akan dikeluarkan oleh bagian perencanaan pada Triwulan II. Nanti Tata jangan lupa untuk sebar kuesionernya jika memang masih ada yang belum dapat atau pun kurang. Kuesioner ini dilakukan hanya kepada 3 bagian saja karena bagian ini yang berhubungan langsung dengan Masyarakat, jadi diharapkan memberikan pelayanan yang ramah tepat waktu, transparan, sesuai SOP, dan tanpa pungutan biaya.

Jadi fungsi survey ini untuk menilai kita sendiri sebenarnya, apakah kita sudah memberikan pelayanan yang prima atau tidak. Jika nanti nilainya rendah, maka kita lihat di komponen mana dia rendahnya sehingga kita akan buat sebuah Tindakan agar hal tersebut tidak terulang lagi.

**2. Paparan Asistem Administrasi dan Umum**

Berikut adalah capaian kinerja dari Asisten Administrasi dan Umum :

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
4.01.01	Meningkatnya kebijakan strategis di bidang administrasi umum	Persentase kebijakan strategi di bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti	100	%	25%	25,00	29,59	-4,59
		Jumlah Kebijakan bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum	12	Bulan				
		Jumlah Kebijakan administrasi umum yang direncanakan menjadi produk hukum	12	Bulan				

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH 2024>

Capaian kinerja untuk Asisten Administrasi dan Umum sudah cukup baik dengan capaian 25% namun apabila dilihat dari Tingkat efisiensi minus ini. Tentu hal ini disebabkan serapan anggaran yang lebih besar, kawan-kawan di bagian ini laju nampaknya dalam penyerapan anggaran. Selanjutnya Administrasi dan Umum menyarankan bahwa target kinerja harus tetap menjadi perhatian, jangan sampai realisasi anggaran 100% namun target kinerja rendah inikan berarti kita tidak efisien dalam penggunaan anggaran, ini berlaku untuk semua dan terkhusus untuk bagian yang berada dibawah Administrasi dan Umum.

**3. Paparan dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Berikut capaiannya khusus asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
4.01.02	Meningkatnya kebijakan Strategis di bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100	%	28,57	28,57	4,65	23,92
		Jumlah Kebijakan dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum	28	Peraturan				
		Jumlah Rumusan kebijakan pada Bagian Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan	28	Peraturan				

		Rakyat yang direncanakan menjadi produk hukum					
--	--	---	--	--	--	--	--

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Berbanding terbalik dengan apa yang telah disampaikan oleh asisten tadi sebelumnya ini Tingkat efisiensinya sangat tinggi sekali karena serapan anggarannya jauh sangat kecil sekali hanya 4,65% saja di triwulan I. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berharap kepada semua bagian untuk selalu kompak dan pupuk rasa kebersamaan kita agar capaian kinerja kita pada tahun ini bisa menjadi maksimal.

#### 4. Paparan Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Capaian Kinerja Bagian Asisten Perekonomian dan Pembangunan dijabarkan sebagai berikut:

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
4.01.03	Meningkatnya fasilitasi penerapan kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan	<b>Persentase kebijakan strategi dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti</b>	100	%	33,33	33,33	21,72	-5,06
		Jumlah rumusan Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum	6	Peraturan				
		Jumlah Rumusan Kebijakan Strategis	6	Peraturan				
		<b>Persentase kebijakan Pembangunan yang ditindaklanjuti</b>	100	%	33,33	33,33		
		Jumlah rumusan kebijakan strategis dibidang pembangunan yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum	15	Peraturan				
		Jumlah rumusan kebijakan strategis yang direncanakan menjadi produk hukum	15	Peraturan				
	Meningkatnya kualitas pemanfaatan kebijakan sumber daya alam	<b>Persentase pemanfaatan kebijakan sumber daya alam yang tepat guna</b>	100	%	0	0,00		
		Jumlah Kebijakan dibidang sumber daya alam yang tepat guna	2	Kebijakan				
		Jumlah Kebijakan sumber Daya alam yang dievaluasi	2	Kebijakan				
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	<b>Persentase kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang di tindaklanjuti</b>	100	%	0	0,00		
Jumlah rumusan Kebijakan strategis dibidang barang dan jasa yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum Daerah		0	Peraturan					
Jumlah rumusan Kebijakan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa		0	Peraturan					

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Selanjutnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan bahwa indikator pada tabel diatas sudah bagus, tetapi kenapa lalu untuk perhitungannya mengenai produk hukum sementara di ekbang itu mengurus masalah perekonomian Pembangunan serta pengadaan barang dan jasa. Tentu ini menurut saya sepertinya tidak nyambung. Jadi yang untuk di saya

ini nanti juga menjadi pertimbangan untuk dijadikan yang sesuai dengan tiga bagian yang saya bawahi. Itu yang pertama, lalu yang kedua ini kenapa masih ada yang Nol capaiannya? Iya itu tadi karena targetnya produk hukum, sehingga kami sendiri juga bingung dan terkadang juga lupa berapa banyak produk hukum yang sudah dibuat, beda halnya untuk bagian hukum karena memang sudah tugasnya jadi tetap terkontrol dong jumlah produk hukumnya. Tapi jika nanti memang harus menghitung produk hukum ya tidak apa juga, mulai saat ini kita sudah harus melakukan perhitungan terhadap jumlah produk hukum kita. Nanti Ekbang dan PBJ coba diingat-ingat lagi dan dihitung yang triwulan I dan yang triwulan II nya nanti dibuat catatan ditulis jika sudah berapa yang jadi.

## 5. Paparan dari Kepala Bagian Umum

Dari hasil yang telah dihimpun oleh kawan-kawan di Bagian Umum yang sudah di entri pada system yang telah dibuat oleh bagian Perencanaan pada Link: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> maka dapat kami sampaikan capaian kinerja kami pada Bagian Umum seperti pada table:

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	95	%	0	0,00	28,82	-28,82
		Jumlah Barang Milik Daerah yang sudah teradministrasi dengan baik	0	Barang	0			
		Jumlah Barang Milik Daerah	0	Barang	0			
2	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	1	100,00	12,12	87,88
3	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	0	0,00	13,67	-13,67
4	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	0	0,00	9,32	-9,32
5	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	0,00	14,88	-14,88
6	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	0,00	37,80	-37,80
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan2	Persentase Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	90	%	22,50	25,00	33,92	-8,92
		Jumlah Administrasi Kepegawaian	437	Pegawai	109			
		Jumlah Pegawai	485	Pegawai	121			
8	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	36	Unit	9	25,00	19,93	5,07
9	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	0	0,00	0,00	0,00
10	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	120	Dok	30	25,00	36,65	-11,65
11	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Siste	117	Dok	0	0,00	0,00	0,00
12	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kine	117	Dok	0	0,00	0,00	0,00

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
13	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	Orang	0	0,00	0,00	0,00
14	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan <sup>3</sup>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	100	%	12,35	12,35	20,33	-7,98
		Jumlah Administrasi Umum yang terpenuhi	23447	Administrasi	2896			
		Jumlah Administrasi Umum	23447	Administrasi	5862			
15	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	0,00	0,00	8,14	-8,14
19	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30	Laporan	0	0,00	20,50	-20,50
21	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1500	Laporan	0	0,00	26,39	-26,39
22	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dok.	0	0,00	16,35	-16,35
23	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan <sup>4</sup>	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100	%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	651	Barang	0			
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang direncanakan	651	Barang	163			
24	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	0	0,00	0,00	0,00
25	Tersedianya Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	650	Unit	0	0,00	0,00	0,00
26	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan <sup>5</sup>	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100	%	0,12	0,12	25,97	-25,85
		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	5083	Laporan	6			
		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5083	Laporan	1271			
27	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5053	Lap	0	0,00	31,15	-31,15
28	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	3	25,00	32,32	-7,32
29	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Laporan	0	0,00	29,38	-29,38

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
30	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3	25,00	2,94	22,06
31	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan <sup>6</sup>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	17	17,02	13,73	3,29
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	47	Unit				
		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5083	Laporan				
32	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit	1	2,94	17,51	-14,56
33	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	0	0,00	17,68	-17,68
34	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	1	50,00	0,00	50,00
35	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan <sup>7</sup>	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah	100	%	25	25,00	23,48	1,52
		Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH yang terpenuhi	12	Plyn				
		Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KD dan WKDH yang direncanakan	12	Plyn				
36	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Orang/Bulan	3	25,00	17,97	7,03
37	Terlaksananya kegiatan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7	Orang	0	0,00	0,00	0,00
38	Tersedianya Pembayaran Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	0	0,00	33,33	-33,33

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Pada Bagian Umum saya rasa sangat banyak indikatornya maka dari itu untuk menghitung atau menginput ini kita tugaskan 3 orang yang semula 1 orang itu sangat tidak efektif. Secara umum di Bagian Umum sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan ini. Dan memang jika Triwulan pertama itu ya memang begitu, apalagi ketuk palu anggaran kita sangat lama sekali. Sebenarnya masih banyak kebingungannya teman-teman kita dibagian Umum ini karena menurut mereka hal ini masih baru, dan kami tetap akan terus berusaha dan berupaya semaksimal mungkin.

**6. Paparan dari Kepala Bagian Organisasi**

Dari hasil yang telah diinput oleh admin pada bagian Organisasi maka dapat dilihat capaian kinerja pada Bagian Organisasi seperti pada tabel berikut ini:

No	Sasaran	Indikator	Target	Sat	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
	Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Tinggi melalui Penilaian Mandiri	15	PD	0	0,00	28,07	-8,07
		Jumlah Analisis Jabatan Perangkat Daerah yang tepat fungsi	6	Anjab	0	0,00		
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	7	PD	0	0,00		
		Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	6	PD	6	100,00		
		Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIPnya B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	18	PD	0	0,00		
2	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah PD yang dilakukan pendampingan pengelolaan kelembagaan	22	PD	0	0,00	28,91	-28,91
		Jumlah PD yang dilakukan pendampingan anjab	5	PD	0	0,00		
3	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang dilakukan Pendampingan Ketatalaksanaan	50	PD	50	100,00	28,52	21,48
		Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Pendampingan	7	PD	0	0,00		
4	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang dilakukan pendampingan SAKIP	50	PD	21	42,00	26,88	44,12
		Jumlah PD yang terlibat dalam Pelaksanaan RB sebagai Leading Sector	6	PD	6	100,00		

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Selanjutnya Kepala Bagian Organisasi memaparkan, bahwa pada Bagian Organisasi terdapat indikator kinerja pada level staf yang mengalami perubahan. Hal ini terjadi terdapat beberapa perubahan aturan dari Kementerian mengenai beberapa OPD yang dilakukan pendampingan. Jumlah Anjab PD yang tepat fungsi semula ditargetkan 6 (enam) Anjab namun dilakukan perbaikan ditargetkan sebanyak 5 (lima) anjab. Terdapat pula beberapa indikator yang berubah hal ini terkait aturan tadi yang sudah saya sebutkan diatas.

Realisasi Nol memang masih belum dilaksanakan dan tetap nanti dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Pada triwulan I OPD yang ditarget melaksanakan RB sebanyak 6 (enam) OPD dan telah dilaksanakan oleh seluruh 6 (enam) OPD yang dimaksud. Pendampingan terhadap OPD ini terus kita lakukan agar OPD-OPD lebih optimal dalam melaksanakan dan meningkatkan kerjanya.

**7. Paparan dari Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

Capaian pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di tampilkan sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target	Sat	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan Pimpinan	Jumlah layanan Fasilitasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	200	Lyn	30	15,00	46,94	-31,87
	Meningkatnya Kualitas layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	230	Lyn	35	15,22		
	Meningkatnya layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	200	Lyn	30	15,00		
2	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1	Lap	0	0	55,51	-55,51

3	Terlaksananya Fasilitas Komunikasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1	Lap	0	0	42,78	-42,78
4	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1	Lap	0	0	43,05	-43,05

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Dari tabel diatas bahwa capaian kinerja sudah mencapai diatas masih sangat rendah sekali dan memang tidak efisien karena dalam penyebaran informasi pimpinan memang harus mengikuti seluruh aktifitas pimpinan sehingga banyak sekali anggaran yang diperlukan sedangkan pembuatan pelaporannya masih belum sempat dilaporkan karena berbagai kesibukan dan kurangnya jumlah pegawai pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Terdapat beberapa permasalahan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dijabarkan sebagai berikut:

- Kurangnya koordinasi dari panitia atau penyelenggara acara/kegiatan sehingga masih belum maksimal dalam memfasilitasi Kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Perlu adanya Surat Edaran yang disebarakan kepada OPD terkait hingga pada level Pemerintah Desa mengenai Tata Cara Fasilitas Keprotokolan yang ada dilanjutkan dengan sosialisasi kepada OPD serta pihak terkait yang akan mengadakan kegiatan maupun acara agar kegiatan yang terlaksana sesuai dengan pedoman Keprotokolan yang ada;
- Terdapat lokasi-lokasi yang sulit terjangkau baik secara langsung (jalan yang terlalu jauh/terisolasi) ataupun daring (blankspot/tanpa sinyal) sehingga himbuan/informasi kegiatan/acara/ucapan dari Bupati, Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah tidak terfasilitasi secara maksimal,serta perlunya meningkatkan kerjasama media-media yang ada baik elektronik,cetak,online,radio yang ada di lingkup Kabupaten Kapuas Hulu. memberikan ucapan atau pemberitahuan yang bersifat fisik dan disebarluaskan hingga ke seluruh lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan bekerja sama dengan pihak lain untuk menyebarluaskan kegiatan,baik melalui fisik,media online,media cetak, media elektronik serta radio maupun media media lain untuk membantu penyebaran informasi agar terfasilitasi komunikasi pimpinan secara efektif dan efisien.
- terdapat kegiatan kegiatan yang dilaksanakan pada lokasi yang minim pencahayaan sehingga sulit meliput/mengambil foto kegiatan serta adanya kerusakan pada sarana prasarana Fotografi dan adanya gangguan malware/virus yang mengganggu penyimpanan arsip Foto dalam bentuk digital, dan kurangnya gudang penyimpanan yang dapat menyimpan arsip dokumentasi/foto secara fisik. Perlu adanya Backup data yang memadai untuk menyimpan seluruh arsip Foto yang ada dan perlu di cek secara berkala komputer atau memori agar tidak terkena virus atau malware yang dapat membahayakan arsip digital tersebut dan perlu adanya antivirus yang kuat dalam menjaga sarana dan prasarana kantor yang menjadi penyimpanan arsip digital tersebut;
- Kurangnya ASN yang menginput kegiatan setiap harinya,sehingga terhambatnya proses penginputan laporan sehingga dipandang perlu untuk menambah personal ASN baru.

## 8. Bagian Tata Pemerintahan

Kepala Bagian Tata Pemerintahan menyampaikan, merasa sangat terbantu sekali dengan sistem kerja yang saat ini telah diberlakukan serta koordinasi yang begitu intensif bagi kami ini sangat luar biasa sehingga banyak selama ini masalah dalam perSAKIPan yang membingungkan menjadi bisa diselesaikan bersama. Berdasarkan data yang telah kami olah dan catat tentang kinerja, maka kami sampaikan capaian kinerja seperti dibawah ini:

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Relisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi	Persentase penyelesaian administrasi batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa	77	%	0	0,00	14,47	22,56
		Jumlah administrasi batas wilayah Kabupaten,	0	Adm				

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Relisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
	(alam, buatan, dan budaya)	Kecamatan dan Desa yang terselesaikan						
		Jumlah batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa	0	Adm				
		Persentase Pemutakhiran Data Rupabumi Kecamatan	74	%				
		Jumlah data Rupa bumi kecamatan yang dimutakhirkan	17	Laporan	0	0,00		
		Jumlah data Rupa Bumi Kecamatan	23	Laporan				
Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) Kabupaten	Persentase Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	90	%					
	Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	24	OPD	100	111,11			
	Jumlah OPD Menyusun LPPD	27	OPD					
2	Terfasilitasinya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	2	Dok	0	0,00	13,00	-13,00
3	Terfasilitasinya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	Dok	0	0,00	2,39	-2,39
4	Terfasilitasinya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	Dok	1	100,00	21,76	78,24
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	21	%				
		Jumlah Kerjasama yang disetujui	5	Kerjsma	13,04	62,11	6,10	56,02
		Jumlah Kerjasama yang direncanakan	23	Kerjsma				
6	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama DalamNegeri	5	Dok	3	60,00	6,10	53,90

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Beberapa indikator memang masih belum terisi karena memang rencana pelaksanaan akan dilaksanakan pada triwulan depannya lagi namun menjadi bahan evaluasi untuk kami agar tetap meningkatkan kinerja sesuai target. Permasalahan ini disebabkan beberapa faktor:

- Tim batas Desa dan Camat sulit membangun kesepakatan Batas Desa, hingga proses pentapan dan penegasan batas desa.
- Masih terdapat pemahaman masyarakat yang keliru terkait batas desa dapat menghilangkan hak kepemilikan tanah masyarakat desa dan perbedaan kepentingan, baik kepentingan, baik kepentingan sosial dan ekonomi.
- Tim batas Desa dan Camat sulit membangun Kesepakatan Batas Desa, Sehingga proses penetapan dan penegasan batas desa masih terdapat pemahaman masyarakat yang keliru terkait batas desa dapat menghilangkan hak kepemilikan tanah masyarakat desa dan perbedaan kepentingan, baik kepentingan sosial dan ekonomi.

Terkait masalah tersebut diatas maka perlu melakukan koordinasi, konsultasi serta melakukan sosialisasi dan pembinaan serta melakukan perbaikan terhadap target kinerja tersebut.

Selain dari indikator diatas terdapat pula permasalahan pada beberapa indikator yang lain:

- Jumlah data Rupa bumi kecamatan yang dimutakhirkan beberapa masih belum dilakukan pemutakhiran sehingga dari 23 kecamatan hanya 5 kecamatan yang telah dimutakhirkan sehingga capaian sangat rendah dengan capaian 29,38%. Pemutakhiran data rupa bumi tersebut menunggu pemutakhiran aplikasi yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk selanjutnya dapat dilakukan verifikasi.
- Kerjasama Daerah semula hanya menangani MoU namun dengan telah terbitnya permendagri yang terbaru maka LSM yang semula ditangani oleh OPD kini ditangani oleh Bagian Pemerintahan. Hal ini lah yang menyebabkan capaian kinerja ini melebihi

target dengan capaian 434,78%. Adapun Upaya yang telah kami lakukan yaitu melakukan perubahan target kinerja pada Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan.

### 9. Paparan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesra sudah berupaya melakukan peningkatan kinerja yang diharapkan sehingga capaiannya dapat dilihat pada table berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100	%	23,53	23,53	4,24	28,61
		Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi	17	SK				
		Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Rakyat	17	SK				
		Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	100	%	25,00	25,00		
		Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	4	Keg				
		Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang direncanakan	4	Keg				
		Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	100	%	50,00	50,00		
		Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	6	Keg				
		Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Masyarakat yang direncanakan	6	Keg				
2	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	Dok	1	100,00	4,08	95,92
3	Terlaksananya Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	101	dok	25	24,75	15,20	9,56
4	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas	544	Dok	181	33,27	4,84	28,44

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Capaian kinerja pada bagian Kesejahteraan Rakyat hampir bisa dikatakan sudah mencapai 100% semua namun demikian masih tetap ada beberapa catatan kami mengenai beberapa target yang mengalami perubahan serta Tingkat kemajuan dari target akhir Renstra yang sudah sangat signifikan melebihi target diuraikan sebagai berikut:

- Terdapat satu indikator yang capaiannya terhadap target akhir Renstra telah melebihi yaitu indikator Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja. Pada dokumen Renstra Target akhir Renstra hanya menargetkan sebanyak 5 Dokumen saja namun setelah berjalan waktu telah terealisasi sebanyak 25 dokumen sehingga hal ini lah yang menyebabkan tingginya tingkat kemajuan capaian pada Renstra. Menanggapi hal tersebut maka perlu dilakukan perbaikan terhadap target pada dokumen Renstra kita.
- prosedur yang dirancang agar lebih terarah dan terukur sehingga perlu adanya peningkatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi agar kinerja bisa berjalan lebih efektif dan efisien.
- sering terjadi perubahan kebijakan sehingga perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi ke pemberi kebijakan
- Belum terevaluasi semuanya kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial maka semua kegiatan harus terevaluasi agar terarah dan lebih efektif
- kurang teliti ASN dalam seleksi dokumen sehingga perlu adanya ketelitian ASN dan koordinasi tentang penerimaa dokumen;
- kurangnya kebijakan terkait kesejahteraan sosial hanya pemberdayaan Masyarakat sehingga perlu adanya peningkatan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial dll;
- kurangnya koordinasi dan sinkronisasi ASN sehingga perlu peningkatan koordinasi ASN disetiap kebijakan.

#### 10. Paparan Kepala Bagian Hukum

Berikut capaian kinerja pada bagian Hukum:

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Realisasi Keuangan %	Tingkat Efisiensi
	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan Masyarakat, dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<b>Persentase kebijakan yang harmonis</b>	<b>70</b>	<b>%</b>	<b>13,64</b>	19,48	19,54	0,08
		Jumlah kebijakan yang harmonis	23	Peraturan				
		Jumlah Kebijakan yang dibuat	66	Peraturan				
		<b>Persentase penyelesaian Proses penyusunan produk hukum</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>27,25</b>	30,28		
		Jumlah produk hukum yang selesai disusun	720	Peraturan				
		Jumlah produk hukum yang di rancang	800	Peraturan				
		<b>Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>13,33</b>	14,81		
		Jumlah fasilitasi bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah	10	Fasilitasi				
		Jumlah fasilitasi bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi yang direncanakan pada Pemerintah Daerah	15	Fasilitasi				
		<b>Persentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>12,5</b>	13,89		
		Jumlah kegiatan publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	19	Keg.				
		Jumlah kegiatan publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-	40	Keg.				

		Undangan Yang seharusnya dilaksanakan						
2	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	800	Dok	218	27,25	21,95	5,30
3	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10	Kasus	2	20,00	35,17	-15,17
4	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	19	Dok	5	26,32	0,00	26,32

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Dari paparan tersebut dapat dilihat bahwa pada bagian hukum terdapat dua indikator yang tidak tercapai serta terdapat tiga indikator yang targetnya mengalami perubahan.

- Terdapat dua indikator yang belum mencapai target namun dari total Tingkat efisiensi, sangat efisien sekali karena memang baru dapat berjalan sedikit kegiatan yang dapat kita lakukan di awal tahun ini. Jadi mohon harap dimaklumi.
- Perubahan terdapat pada tiga indikator yang berada pada level staf saya. Saya lihat bahwa target nya itu sebelumnya sangat sedikit sekali sehingga menurut saya tidak mungkin sesedikit itu. Jadi kami berinisiatif merubah target itu agar nantinya pada akhir tahun target bisa tercapai. Ini memang kelemahan kami dalam menentukan target ini. Karena memang sebelumnya belum pernah melakukan pengukuran seperti ini.

#### 11. Paparan Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA

Berikut kami tampilkan hasil capaian kinerja pada Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA:

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1	<b>Meningkatnya Peran Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam merumuskan kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>33</b>	33,33	27,46	5,88
		Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian	6	Kebijakan				
		Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	6	Kebijakan				
2	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Dok	1	25,00	40,60	-15,60
3	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Dok	1	25,00	25,94	-0,94
4	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	1	Dok	0	0,00	38,07	-38,07
5	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	dok	0	0,00	13,45	-13,45
6	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2	Dok	0	0,00	2,84	-2,84
7	<b>Meningkatnya Peran Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam merumuskan kebijakan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>33,33</b>	33,33	16,62	16,72
		Jumlah rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan	15	Kebijakan				
		Jumlah rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	15	Kebijakan				

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
8	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	Dok	1	25,00	28,02	-3,02
9	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	Lap	1	25,00	0,00	25,00
10	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	100	Dok	25	25,00	19,48	5,52
11	<b>Meningkatnya Peran Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam merumuskan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>33</b>	33,33	17,39	15,94
		Jumlah rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam	15	Kebijakan				
		Jumlah rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	15	Kebijakan				
12	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4	Dok	1	25,00	2,30	22,70
13	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	Dok	0	0,00	2,52	-2,52
14	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2	Dok	0	0,00	50,00	-50,00

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Dari tabel tersebut kami ingin menginformasikan bahwa masih banyak terdapat kekurangan kami namun kami tetap akan wujudkan itu semua sesuai target dan akan terus melakukan perbaikan. Adapun Masalah pada Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA sebagai berikut :

- Proses perizinan pertambangan rakyat yang difasilitasi merupakan kewenangan pemerintah provinsi melalui sistem OSS. IPR yang difasilitasi sudah masuk dalam sistem OSS, Pemerintah Provinsi sedang dalam tahap verifikasi dan validasi semua persyaratan. Maka dari itu kami sedang menunggu proses di Pemerintah Provinsi Kalbar.
- Sering terlambatnya data dari BUMD dan BLUD yang dilaporkan ke Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga kami harus sering berkomunikasi dan konsultasi ke BUMD serta dibuat surat untuk penyampaian laporan ke BUMD tersebut.
- Jumlah pengendalian dan distribusi perekonomian sering terjadinya keterlambatan data dari wilayah sample sehingga kami harus terus berkoordinasi dengan Kepala Pimpinan Kecamatan Sample terkait kesiapan data.
- Belum terlaksananya persiapan data UMKM sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan oleh karenanya perlu berkoordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan UMKM;

- Kurangnya SDM seperti dokter spesialis di RS Kab. KH sehingga perlu melakukan koordinasi serta Study Banding ke RSUD Soedarso Pontianak yang sudah melaksanakan BLUD;

## 12. Paparan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Berikut ini adalah capaian kinerja pada Bagian Pengadaan barang dan jasa:

No	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi
	<b>Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Efektif dan Efisien</b>	<b>Persentase capaian efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/Seleksi dan e-purchasing</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>25</b>	31,25	21,55	37,51
		Jumlah paket pekerjaan melalui metode pemilihan tender seleksi dan e-purchasing diproses (UKPBJ)	59	Paket				
		Jumlah paket pekerjaan melalui metode pemilihan tender seleksi dan e-purchasing diusulkan kepada UKPBJ)	74	Paket				
		<b>Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik</b>	<b>50</b>	<b>OPD</b>	<b>80</b>	<b>160,00</b>		
		<b>Jumlah pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)</b>	<b>20</b>	<b>PIK Ush</b>	<b>5</b>	25,00		
			50	OPD	10	20,00		
	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	525	Dok	128	24,38	20,42	3,96
	Terkelolanya Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	78	Dok	8	10,26	19,48	-9,22
	Terlaksananya Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60	Org	15	25,00	27,71	-2,71


Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2024

Terdapat salah satu indikator yang sudah mencapai 100%. Kami tau bahwa ini terlalu dini untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Namun kami selalu memberikan layanan Ketika ada yang meminta dilayanan dalam pengadaan barang dan jasa. Adapun beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya Jumlah usulan tender pada tahun 2024, dikarenakan pergeseran anggaran, konsolidasi paket dan tender dini untuk paket pekerjaan tahun anggaran 2025;
- Meningkatnya Jumlah usulan tender pada tahun 2024, dikarenakan pergeseran anggaran dan konsolidasi paket

## 13. Analisis Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan hasil pemaparan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka selanjutnya melakukan analisis permasalahan dan strategis pemecahan masalahnya dengan analisis SWOT sebagai berikut:

<p><b>FAKTOR INTERNAL</b></p> 	<p><b>Kekuatan (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai SAKIP B</li> <li>2. Jumlah Anggota yang banyak</li> <li>3. Tim SAKIP yang siap bekerja</li> </ol>	<p><b>Kelemahan (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya sumber daya dalam penanganan SAKIP</li> <li>2. Tim penyusun SAKIP belum memiliki sertifikat Bimtek SAKIP</li> <li>3. LPPD target sudah tidak menggunakan nilai lagi</li> <li>4. Monitoring &amp; Evaluasi terlambat atau tidak bisa dilakukan</li> <li>5. SKP tidak selaras dengan PK</li> </ol>
	<p><b>RUMUSAN STRATEGI</b></p>	
<p><b>Peluang (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Perbup 54 tahun 2022</li> <li>2. Terdapat Hasil Evaluasi SAKIP</li> <li>3. Terdapat form penialain mandiri SAKIP</li> <li>4. Adanya pihak Inkab dan Bagian Organisasi yang bisa di ajak berdiskusi</li> <li>5. Banyak referrensi belajar di internet</li> </ol>	<p><b>Strategi S-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penilaian Mandiri AKIP</li> <li>2. Melibatkan seluruh tim SAKIP dalam penilaian mandiri</li> <li>3. Belajar secara mandiri dari internet</li> </ol>	<p><b>Strategi W-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator pada Asisten/ Program tidak berhubungan dengan IKU Sekda dan tidak mengakomodir bawahannya</li> <li>2. Berkoordinasi dan konsultasi secara aktif</li> <li>3. Jemput bola data pada Bagian</li> <li>4. Menyusun pohon kinerja, Menyusun cascading, Menyusun Renstra, Menyusun Formulasi, perhitungan sesuai indikator (I</li> <li>5. Melakukan perubahan target kinerja pada Renstra baru</li> <li>6. Wajib melakukan evaluasi setiap triwulannya</li> <li>7. Buat surat 1 bulan sebelum pelaksanaan (Tr 1 buat Februari, Tr2 Mei, tr 3 Agustus, tr 4 November)</li> <li>8. Surat pengumpulan data kinerja juga dibuat sama seperti diatas</li> <li>9. Batas pengumpulan data tr 1 14 April, tr 2 14 Juli, tr 3 14 Oktober, tr 4 14 januari</li> <li>10. Kumpulkan semua SKP</li> <li>11. Memastikan Kembali bahwa PK sudah sesuai</li> </ol>
<p><b>Ancaman (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan aturan mengenai item penilaian SAKIP</li> <li>2. Teknologi yang berkembang pesat</li> </ol>	<p><b>Strategi S-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Updating untuk mempelajari peraturan terbaru</li> </ol>	<p><b>Strategi W-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat/ Bimtek SAKIP</li> </ol>

Berdasarkan dari analisis SWOT tersebut diatas, maka diuraikan strategi sebagai upaya perbaikan kedepannya:

- 1) Melakukan penilaian Mandiri AKIP
- 2) Melibatkan seluruh tim SAKIP dalam penilaian mandiri
- 3) Belajar secara mandiri dari internet
- 4) Indikator pada Asisten/ Program tidak berhubungan dengan IKU Sekda dan tidak mengakomodir bawahannya
- 5) Berkoordinasi dan konsultasi secara aktif
- 6) Jemput bola data pada Bagian
- 7) Menyusun pohon kinerja, Menyusun cascading, Menyusun Renstra, Menyusun Formulasi, perhitungan sesuai indikator (IKI)
- 8) Melakukan perubahan target kinerja pada Renstra baru
- 9) Wajib melakukan evaluasi setiap triwulannya
- 10) Buat surat 1 bulan sebelum pelaksanaan (Tr 1 buat Februari, Tr2 Mei, tr 3 Agustus, tr 4 November)
- 11) Surat pengumpulan data kinerja juga dibuat sama seperti diatas
- 12) Batas pengumpulan data tr 1 14 April, tr 2 14 Juli, tr 3 14 Oktober, tr 4 14 januari
- 13) Kumpulkan semua SKP
- 14) Memastikan Kembali bahwa PK sudah sesuai
- 15) Updating untuk mempelajari peraturan terbaru
- 16) Diklat/ Bimtek SAKIP

Itulah tadi strategi yang harus kita lakukan diwaktu mendatang, dan supaya hal tersebut Kembali kita bahas pada triwulan II untuk memastikan bahwa strategi telah berjalan dengan baik dan benar.

#### 14. Tindak Lanjut terhadap Hasil Evaluasi pada LKjIP 2023


Berikut ini adalah tabel permasalahan pada tahun 2023:

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi	Status Progres
1	Aparatur dari tingkat yang paling bawah sampai paling atas harus mengenal SAKIP	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan pendampingan terhadap bagian</li><li>- Jemput Bola Data yang diperlukan</li><li>- Melakukan rapat Monev setiap triwulan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sudah membentuk tim SAKIP dengan SK Sekda</li><li>- Membuat Grup WA SAKIP</li><li>- Penginputan data oleh masing-masing bagian melalui aplikasi spreadsheet</li><li>- Rapat monev sudah pada hari ini</li></ul>	Selesai
2	Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah pada awal tahun	Menyusun Renaksi Kinerja pada Triwulan II	Proses	Belum
3	Melaksanakan review Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara berkala	Reviu Renstra sebaiknya untuk Renstra baru saja	Penyusunan Draf Renstra Baru: - <a href="#">Link</a> - <a href="#">Link</a>	Selesai
4	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian sasaran	Pengadaan Laptop untuk setiap staf pada Tim SAKIP Triwulan II	Proses	Belum

Sumber: LKjIP 2023 (Bab Penutup)

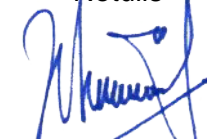
Demikian Rapat Evaluasi ini dilakukan dan telah disepakati bersama untuk segera ditindaklanjuti.

Pimpinan Rapat,

  
Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M.

Putussibau, 26 April 2024

Notulis

  
NICOLAUS PURWANTO, S.IP.

**MONITORING KINERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TRIWULAN 1 TAHUN 2024**

Sumber: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja>

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Maret	%		
4.01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	BB	rediksi	B				B	87,50	Ada	CC	A	77,78%	89.168.696.623	15.132.927.011	16,97	12,20	SEKDA
	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah	3,3	Nilai	0				0	0,00	0	2,6708	3,8	70,28%	SEKDA					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretaris	80,8	Nilai	0				0	0,00	Ada	83,84	81	103,51%					SEKDA
4.01.01	Meningkatnya kebijakan strategis	Persentase kebijakan strategi di bidang administrasi	100	%	25				25	25,00	KEGIAT	100	100	25,00%	41.950.064.001	12.413.497.633	29,59	-4,59	ASISTEN ADUM
		Jumlah Kebijakan bidang administrasi umum yang direvisi	12	Bulan	3														
4.01.01.2.01	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	%	76				18,92	18,92	Ada	100	100	18,92%	714.948.500	146.238.287	20,45	-1,54	PERKEU
		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	37	Dok	7														
4.01.01.2.01.0001	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	2	Dok	0				0	0,00	Ada	2	10	20,00%	401.401.000	146.238.287	36,43	-36,43	PERKEU
4.01.01.2.01.0002	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan	1	Dok	0				0	0,00	0	1	5	20,00%	43.164.500	0	0,00	0,00	PERKEU
4.01.01.2.01.0003	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan	1	Dok	0				0	0,00	Ada	1	5	20,00%	32.607.000	0	0,00	0,00	PERKEU
4.01.01.2.01.0004	Tersedianya Dokumen DPA Sekretaris Daerah dan Laporan Hasil Pelaksanaan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan	1	Dok	1				1	100,00	Ada	1	5	40,00%	32.784.000	0	0,00	100,00	PERKEU
4.01.01.2.01.0005	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan	1	Dok	0				0	0,00	0	1	5	20,00%	17.938.000	0	0,00	0,00	PERKEU
4.01.01.2.01.0006	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran	5	Lap	1				1	20,00	Ada	4	25	20,00%	156.739.000	0	0,00	20,00	PERKEU
4.01.01.2.01.0007	Terlaksananya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4	Lap	0				0	0,00	Ada	1	5	20,00%	30.315.000	0	0,00	0,00	PERKEU
4.01.01.2.02	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100	%	25				25,00	25,00	0	100	100	25,00%	13.743.202.325	4.533.654.537	32,99	-7,99	PERKEU
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kinerja Pelaksana	1	Dok	0														
4.01.01.2.02.0001	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	12	Bln	3				3	25,00	Ada	12	60	25,00%	12.436.284.325	4.264.439.437	34,29	-9,29	PERKEU
4.01.01.2.02.0002	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi	1	Dok	0				0	0,00	0	1	5	20,00%	209.214.000	0	0,00	0,00	PERKEU
4.01.01.2.02.0003	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian	1	Dok	0				0	0,00	0	1	5	20,00%	821.720.000	114.120.000	13,89	-13,89	PERKEU
4.01.01.2.02.0004	Tersedianya Laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan	1	Dok	0				0	0,00	0	1	5	20,00%	30.333.000	0	0,00	0,00	PERKEU
4.01.01.2.02.0005	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	1				1	100,00	0	1	5	40,00%	45.527.000	0	0,00	100,00	PERKEU
4.01.01.2.02.0006	Tersedianya Pengelolaan dan Penyediaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	Dok	0				0	0,00	0	1	5	20,00%	160.424.000	155.095.100	96,68	-96,68	PERKEU
4.01.01.2.02.0007	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	4	Lap	1				1	25,00	0	4	20	25,00%	32.862.000	0	0,00	25,00	PERKEU
4.01.01.2.02.0008	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	1	Dok	0				0	0,00	0	1	5	20,00%	6.838.000	0	0,00	0,00	PERKEU
4.01.01.2.03	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola	95	%	0				0	0,00	0	100	97,5	0,00%	457.883.500	131.976.470	28,82	-28,82	UMUM
		Jumlah Barang Milik Daerah yang sudah terdaptasi	0	Barang	0														
4.01.01.2.03.0001	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dok	1				1	100,00	0	1	5	40,00%	33.000.000	4.000.000	12,12	87,88	UMUM
4.01.01.2.03.0002	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	1	Dok	0				0	0,00	0	1	5	20,00%	39.551.000	5.407.000	13,67	-13,67	UMUM
4.01.01.2.03.0003	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	1	apora	0				0	0,00	0	1	5	20,00%	51.359.500	4.787.500	9,32	-9,32	UMUM
4.01.01.2.03.0005	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan	1	apora	0				0	0,00	0	4	5	80,00%	36.975.000	5.502.500	14,88	-14,88	UMUM
4.01.01.2.03.0006	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	apora	0				0	0,00	0	1	5	20,00%	296.998.000	112.279.470	37,80	-37,80	UMUM
4.01.01.2.05	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang tertib	90	%	90				22,50		0	100	95	23,68%	3.662.798.676	1.242.592.000	33,92	-8,92	UMUM
		Jumlah Administrasi Kepegawaian	437	pegawai	109														
4.01.01.2.05.0001	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	36	Unit	9				9	25,00	0	1	5	180,00%	120.400.000	24.000.000	19,93	5,07	UMUM
4.01.01.2.05.0002	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kebersihan	1	Paket	0				0	0,00	0	2	5	40,00%	135.000.000	0	0,00	0,00	UMUM
4.01.01.2.05.0003	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	120	Dok	30				30	25,00	0	1	500	6,20%	3.325.168.676	1.218.592.000	36,65	-11,65	UMUM
4.01.01.2.05.0004	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan	117	Dok	0				0	0,00	0	1	500	0,20%	54.880.000	0	0,00	0,00	UMUM
4.01.01.2.05.0005	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	117	Dok	0				0	0,00	0	1	585	0,17%	17.350.000	0	0,00	0,00	UMUM
4.01.01.2.05.0009	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40	Orang	0				0	0,00	0	40	200	20,00%	10.000.000	0	0,00	0,00	UMUM
4.01.01.2.06	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100	%	49				12,35		0	100	95	13,00%	8.865.803.000	1.802.555.076	20,33	-7,98	UMUM
		Jumlah Administrasi Umum yang terpenuhi	####	ministrasi	2896														
4.01.01.2.06.0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	Paket	0,00				0,00	0,00	0	1	5	20,00%	145.000.000	0	0,00	0,00	UMUM
4.01.01.2.06.0002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	0,00				0,00	0,00	0	1	5	20,00%	274.800.000	0	0,00	0,00	UMUM
4.01.01.2.06.0003	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Diserahkan	1	Paket	0,00				0,00	0,00	0	1	5	20,00%	821.025.000	0	0,00	0,00	UMUM
4.01.01.2.06.0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diserahkan	1	Paket	0,00				0,00	0,00	0	1	5	20,00%	215.000.000	17.495.000	8,14	-8,14	UMUM
4.01.01.2.06.0005	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	0,00				0,00	0,00	0	1	5	20,00%	205.680.000	0	0,00	0,00	UMUM
4.01.01.2.06.0008	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30	apora	0				0	0,00	0	50	250	20,00%	1.677.960.000	344.060.000	20,50	-20,50	UMUM

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Maret	%			
4.01.01.2.06.0009	Terlaksananya rapat koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koord	1500	laporan	0				0	0,00	0	1500	7500	20,00%	5.353.583.000	1.412.758.076	26,39	-26,39	UMUM	
4.01.01.2.06.0010	Terlaksananya Penatausahaan Arsip	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinam	1	Dok.	0				0	0,00	0	1	5	20,00%	172.755.000	28.242.000	16,35	-16,35	UMUM	
4.01.01.2.07	Meningkatnya Kualitas Penyeleng	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang	100	%	0				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	UMUM	
		Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik	651	Barang	0				0	0,00	0	100	95	105,26%	750.700.000	0	0,00	0,00	UMUM	
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang C	651	Barang	163				163											UMUM
4.01.01.2.07.0002	Tersedianya Kendaraan Dinas Opera	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	1	Unit	0				0	0,00	0	3	25	12,00%	708.000.000	0	0,00	0,00	UMUM	
4.01.01.2.07.0005	Tersedianya Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	650	Unit	0				0	0,00	0	1	17	5,88%	42.700.000	0	0,00	0,00	UMUM	
4.01.01.2.08	Meningkatnya Kualitas Penyeleng	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerit	100	%	0				0,12	0	100	95	0,12%	3.429.465.000	890.614.019	25,97	-25,85	UMUM		
		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Da	5083	laporan	6				6		0	100	95	0,12%	3.429.465.000	890.614.019	25,97	-25,85	UMUM	
4.01.01.2.08.0001	Terlaksananya Penyediaan Jasa Sur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Meny	5053	Lap	0				0	0,00	0	3000	15000	20,00%	61.000.000	19.000.000	31,15	-31,15	UMUM	
4.01.01.2.08.0002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12	laporan	3				3	25,00	0	12	60	25,00%	2.100.000.000	678.722.919	32,32	-7,32	UMUM	
4.01.01.2.08.0003	Tersedianya Jasa Peralatan dan Per	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan da	6	laporan	0				0	0,00	0	1	25	4,00%	588.465.000	172.900.000	29,38	-29,38	UMUM	
4.01.01.2.08.0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan U	12	laporan	3				3	25,00	0	1	25	16,00%	680.000.000	19.991.100	2,94	22,06	UMUM	
4.01.01.2.09	Meningkatnya Kualitas Penyeleng	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang	100	%	17				17	17,02	0	0	95	17,92%	2.678.796.000	367.872.515	13,73	3,29	UMUM	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusar	47	Unit	2				2											UMUM
4.01.01.2.09.0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Bia	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lap	34	Unit	1				1	2,94	0	3	100	4,00%	1.299.975.000	227.562.515	17,51	-14,56	UMUM	
4.01.01.2.09.0006	Terlaksananya Pemeliharaan Pera	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipe	11	Unit	0				0	0,00	0	0	50	0,00%	793.821.000	140.310.000	17,68	-17,68	UMUM	
4.01.01.2.09.0009	Terpenuhnya Pemeliharaan/Rehabil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	1				1	50,00	0	0	8	12,50%	585.000.000	0	0,00	50,00	UMUM	
4.01.01.2.11	Meningkatnya Kualitas Penyeleng	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kese	100	%	100				25	25,00	0	100	95	26,32%	726.831.000	170.663.850	23,48	1,52	UMUM	
		Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasi	12	Plyn	3				3											UMUM
		Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasi	12	Plyn	3				3											UMUM
4.01.01.2.11.0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Ke	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunj	12	ang/Bu	3				3	25,00	0	12	60	25,00%	207.831.000	37.343.850	17,97	7,03	UMUM	
4.01.01.2.11.0003	Terlaksananya kegiatan Medical Che	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check U	7	Orang	0				0	0,00	0	1	20	5,00%	119.000.000	0	0,00	0,00	UMUM	
4.01.01.2.11.0004	Tersedianya Pembayaran Dana Pen	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang	2	ang/Bu	0				0	0,00	0	100	10	0,00%	400.000.000	133.320.000	33,33	-33,33	UMUM	
4.01.01.2.13	Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah dengan Tingkat K	15	PD	0				0	0,00	-	0	75	0,00%	639.447.000	179.490.744	28,07	-8,07	ORGANISASI	
		Jumlah Analisis Jabatan Perangkat Daerah	6	Anjab	0				0	0,00	-	0	30	0,00%					ORGANISASI	
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menet	7	PD	0				0	0,00	-	0	35	0,00%					ORGANISASI	
		Jumlah Perangkat Daerah yang menyeleng	6	PD	6				6	100,00	-	0	30	20,00%					ORGANISASI	
		Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIF	18	PD	0				0	0,00	-	0	90	0,00%					ORGANISASI	
4.01.01.2.13.0001	Terlaksananya Pengelolaan Kelemba	Jumlah PD yang dilakukan pendampingan peng	22	PD	0				0	0,00	-	0	5	0,00%	210.505.000	60.858.926	28,91	-28,91	ORGANISASI	
		Jumlah PD yang dilakukan pendampingan anja	5	PD	0				0	0,00	-	0	1E-13	0,00%					ORGANISASI	
4.01.01.2.13.0002	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan	Jumlah PD yang dilakukan Pendampingan Keta	50	PD	50				50	100,00	-	0	5	100,00%	203.442.000	58.015.718	28,52	21,48	ORGANISASI	
		Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan F	7	PD	0				0	0,00	-	0	0	0,00%					ORGANISASI	
4.01.01.2.13.0003	Terlaksananya Peningkatan Kinerja	Jumlah PD yang dilakukan pendampingan SAK	50	PD	21				21	42,00	-	0	5	420,00%	225.500.000	60.616.100	26,88	44,12	ORGANISASI	
		Jumlah PD yang terlibat dalam Pelaksanaan RE	6	PD	6				6	100,00	-	0	1E-13	#####					ORGANISASI	
4.01.01.2.14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Jumlah layanan Fasilitas bagi Kepala Daer	200	Lyn	30				30	15,00	0	0	750	4,00%	6.280.189.000	2.947.840.135	46,94	-31,87	PROKOPIM	
		Meningkatnya Kualitas layanan k	230	Lyn	35				35	15,22	0	0	750	4,67%					PROKOPIM	
		Meningkatnya layanan dokument	200	Lyn	30				30	15,00	0	0	750	4,00%					PROKOPIM	
4.01.01.2.14.0001	Terlaksananya Fasilitas Keprotokola	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	1	Lap	0				0	0,00	0	1	5	20,00%	1.979.300.000	1.098.753.135	55,51	-55,51	PROKOPIM	
4.01.01.2.14.0002	Terlaksananya Fasilitas Komunikasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pin	1	Lap	0				0	0,00	0	1	5	20,00%	898.195.000	384.205.000	42,78	-42,78	PROKOPIM	
4.01.01.2.14.0003	Terlaksananya Pendokumentasian T	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pim	1	Lap	0				0	0,00	0	1	5	20,00%	3.402.694.000	1.464.882.000	43,05	-43,05	PROKOPIM	
4.01.02	Meningkatnya kebijakan Strategis	Persentase kebijakan strategis dibidang Pe	100	%	114				28,57	28,57	KEGIAT	100	100	28,57%	44.143.281.722	2.051.380.668	4,65	23,92	ASISTEN PEM KESRA	
		Jumlah Kebijakan dibidang Pemerintahan, Huk	28	eraturan	8															ASISTEN PEM KE
4.01.02.2.01	Meningkatnya jumlah wilayah yar	Jumlah Rumusan kebijakan pada Bagian Peme	28	eraturan	7														ASISTEN PEM KE	
		Persentase penyelesaian administrasi batas	77	%	0				0	0,00	KEGIAT	0	100	0,00%					TAPEM	
		Jumlah administrasi batas wilayah Kabupaten,	0	Adm	0															TAPEM
		Jumlah batas wilayah Kabupaten, Kecamatan d	0	Adm	0															TAPEM
		Persentase Pemuntakhiran Data Rupabumi	74	%	0															TAPEM
		Jumlah data Rupa bumi kecamatan yang dimut	17	laporan	0					0	0,00	KEGIAT	0	100	0,00%	785.150.400	113.627.800	14,47	22,56	TAPEM
Meningkatnya kualitas Laporan P	Persentase Jumlah OPD yang Menyusun LF	90	%	400					100	111,11	KEGIAT	0	95	105,26%					TAPEM	
	Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai pet	24	OPD	27															TAPEM	
4.01.02.2.01.0001	Terfasilitasinya Penataan Administra	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	2	Dok	0				0	0,00	KEGIAT	0	10	0,00%	244.005.000	31.721.900	13,00	-13,00	TAPEM	

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Maret	%			
4.01.02.2.01.0002	Terfasilitasinya Pengelolaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	1	Dok	0				0	0,00	KEGIAT	0	5	0,00%	185.096.400	4.419.400	2,39	-2,39	TAPEM	
4.01.02.2.01.0003	Terfasilitasinya Fasilitasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	1	Dok	1				1	100,00	KEGIAT	0	5	20,00%	356.049.000	77.486.500	21,76	78,24	TAPEM	
4.01.02.2.02	Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang bi	100	%	94				23,53	23,53	KEGIAT	0	100	23,53%	42.480.669.222	1.800.386.388	4,24	28,61	KESRA	
		Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang t	17	SK	4														KESRA	
		Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraa	17	SK	4														KESRA	
		Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan	100	%	100					25,00	25,00	KEGIAT	0	100					25,00%	KESRA
		Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijak	4	Keg	1															KESRA
		Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijak	4	Keg	1															KESRA
		Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan	100	%	200					50,00	50,00	KEGIAT	0	100					50,00%	KESRA
		Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijak	6	Keg	3															KESRA
4.01.02.2.02.0001	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan E	1	Dok	1				1	100,00	KEGIAT	0	5	20,00%	41.551.353.922	1.694.751.888	4,08	95,92	KESRA	
4.01.02.2.02.0002	Terlaksananya Kebijakan Evaluasi d	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, da	101	dok	25				25	24,75	KEGIAT	1	5	520,00%	585.773.000	89.020.500	15,20	9,56	KESRA	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, da	544	Dok	181				181	33,27	KEGIAT	1	650	28,00%	343.542.300	16.614.000	4,84	28,44	KESRA	
4.01.02.2.03	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, kebutuhan Masyarakat, dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase kebijakan yang harmonis	70	%	55				13,64	19,48	KEGIAT	0	90	15,15%	624.106.100	121.921.000	19,54	0,08	HUKUM	
		Jumlah kebijakan yang harmonis	23	eratur	9														HUKUM	
		Jumlah Kebijakan yang dibuat	66	eratur	17														HUKUM	
		Persentase penyelesaian Proses penyusun	90	%	109					27,25	30,28	KEGIAT	0	95					28,68%	HUKUM
		Jumlah produk hukum yang selesai disusun	720	eratur	218															HUKUM
		Jumlah produk hukum yang di rancang	800	eratur	200															HUKUM
		Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	90	%	53					13,33	14,81	KEGIAT	0	95					14,04%	HUKUM
		Jumlah fasilitasi bantuan hukum Litigasi dan Nc	10	asilita	2															HUKUM
		Jumlah fasilitasi bantuan hukum Litigasi dan Nc	15	asilita	4															HUKUM
		Persentase Publikasi dan penyebarluasan F	90	%	50					12,5	13,89	KEGIAT	0	95					13,16%	HUKUM
4.01.02.2.03.0001	Terfasilitasinya Penyusunan Produk	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	800	Dok	218				218	27,25	KEGIAT	0	500	43,60%	317.731.500	69.752.100	21,95	5,30	HUKUM	
4.01.02.2.03.0002	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hu	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bar	10	Kasus	2				2	20,00	KEGIAT	0	100	2,00%	148.351.000	52.168.900	35,17	-15,17	HUKUM	
4.01.02.2.03.0003	Terlaksananya Pendokumentasian P	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Inform	19	Dok	5				5	26,32	KEGIAT	0	5	100,00%	158.023.600	0	0,00	26,32	HUKUM	
4.01.02.2.04	Meningkatnya kuantitas dan kual	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	21	%	52				13,04	62,11	KEGIAT	0	26	50,17%	253.356.000	15.445.480	6,10	56,02	TAPEM	
		Jumlah Kerjasama yang disetujui	5	erjasm	3														TAPEM	
		Jumlah Kerjasama yang direncanakan	23	erjasm	6														TAPEM	
4.01.02.2.04.0001	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama D	5	Dok	3				3	60,00	KEGIAT	0	25	12,00%	253.356.000	15.445.480	6,10	53,90	TAPEM	

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab	
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Maret	%			
4.01.03	Meningkatnya fasilitasi penerapan kebijakan Perencanaan Dan Pembangunan	Persentase kebijakan strategi dibidang Per	100	%	133														ISTEN EKBAI	
		Jumlah rumusan Kebijakan Strategis dibidang Perencanaan yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum	6	eratura	2				33,33	33,33	KEGIAT	0	100	33,33%						ISTEN EKBAI
		Jumlah Rumusan Kebijakan Strategis	6	eratura	2															ISTEN EKBAI
		Persentase kebijakan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	%	133															ISTEN EKBAI
		Jumlah rumusan kebijakan strategis dibidang pembangunan yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum	15	eratura	5				33,33	33,33	KEGIAT	0	100	33,33%						ISTEN EKBAI
		Jumlah rumusan kebijakan strategis yang direncanakan menjadi produk hukum	15	eratura	4															ISTEN EKBAI
	Meningkatnya kualitas pemanfaat	Meningkatnya kualitas pemanfaatan	Persentase pemanfaatan kebijakan sumber daya alam yang tepat guna	100	%	0									3.075.350.900	668.048.710	21,72	-5,06	ISTEN EKBAI	
			Jumlah Kebijakan dibidang sumber daya alam yang tepat guna	2	ebijaka	0				0	0,00	KEGIAT	0	100	0,00%					ISTEN EKBAI
			Jumlah Kebijakan sumber Daya alam yang dievaluasi	2	ebijaka	1														ISTEN EKBAI
	Meningkatnya Kualitas Layanan P	Meningkatnya Kualitas Layanan P	Persentase kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang di tindaklanjuti	100	%	0														ISTEN EKBAI
			Jumlah rumusan Kebijakan strategis dibidang barang dan jasa yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum Daerah	0	eratura	0				0	0,00	KEGIAT	0	100	0,00%					ISTEN EKBAI
			Jumlah rumusan Kebijakan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa	0	eratura	0														ISTEN EKBAI
4.01.03.2.01	Meningkatnya Peran Koordinasi,	Persentase rekomendasi kebijakan perekon	100	%	133														EKBANG SDA	
		Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian	6	ebijaka	2				33	33,33	KEGIAT	0	100	33,33%	348.000.000	95.551.675	27,46	5,88	EKBANG SDA	
4.01.03.2.01.0001	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronis	4	Dok	1				1	25,00	KEGIAT	0	20	5,00%	116.000.000	47.098.575	40,60	-15,60	EKBANG SDA	
4.01.03.2.01.0002	Terlaksananya Pengendalian dan Di	Jumlah Pengendalian dan Distribusi Perekonon	4	Dok	1				1	25,00	KEGIAT	0	100	1,00%	82.000.000	21.269.900	25,94	-0,94	EKBANG SDA	
4.01.03.2.01.0003	Terlaksananya Perencanaan dan Pe	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	1	Dok	0				0	0,00	KEGIAT	0	20	0,00%	50.000.000	19.035.600	38,07	-38,07	EKBANG SDA	
4.01.03.2.01.0004	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronis	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLU	1	dok	0				0	0,00	KEGIAT	0	100	0,00%	50.000.000	6.726.250	13,45	-13,45	EKBANG SDA	
4.01.03.2.01.0005	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronis	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2	Dok	0				0	0,00	KEGIAT	0	100	0,00%	50.000.000	1.421.350	2,84	-2,84	EKBANG SDA	
4.01.03.2.02	Meningkatnya Peran Koordinasi,	Persentase rekomendasi kebijakan Adminis	100	%	133														EKBANG SDA	
		Jumlah rekomendasi kebijakan Administrasi Pe	15	ebijaka	5				33,33	33,33	KEGIAT	0	100	33,33%	188.400.000	31.305.700	16,62	16,72	EKBANG SDA	
4.01.03.2.02.0001	Terlaksananya Pengendalian dan Ev	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan F	4	Dok	1				1	25,00	KEGIAT	0	60	1,67%	40.000.000	11.206.000	28,02	-3,02	EKBANG SDA	
4.01.03.2.02.0002	Terlaksananya Pengendalian dan Ev	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evalu	4	Lap	1				1	25,00	KEGIAT	0	60	1,67%	45.200.000	0	0,00	25,00	EKBANG SDA	
4.01.03.2.02.0003	Terlaksananya Pengelolaan Evaluas	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	100	Dok	25				25	25,00	KEGIAT	0	100	25,00%	103.200.000	20.099.700	19,48	5,52	EKBANG SDA	
4.01.03.2.03	Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Efektif dan Efisien	Persentase capaian efisiensi dan efektifitas	80	%	100														PBJ	
		Jumlah paket pekerjaan melalui metode pemilih	59	Paket	16				25	31,25	KEGIAT	0	90	27,78%					PBJ	
		Jumlah paket pekerjaan melalui metode pemilih	74	Paket	16														PBJ	
		Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Bara	50	OPD	80				80	160,00	KEGIAT	0	250	32,00%	2.392.995.900	515.807.685	21,55	37,51	PBJ	
		Jumlah pembinaan bagi para pelaku penga	20	Ik Us	5				5	25,00	KEGIAT	0	100	5,00%					PBJ	
4.01.03.2.03.0001	Terkelolanya Pengadaan Barang dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaa	525	Dok	128				128	24,38	KEGIAT	0	2500	5,12%	1.494.421.800	305.133.470	20,42	3,96	PBJ	
4.01.03.2.03.0002	Terkelolanya Pengelolaan Layanan P	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Se	78	Dok	8				8	10,26	KEGIAT	0	353	2,27%	465.345.100	90.637.275	19,48	-9,22	PBJ	
4.01.03.2.03.0003	Terlaksananya Advokasi dan Penang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan	60	Org	15				15	25,00	KEGIAT	0	250	6,00%	433.229.000	120.036.940	27,71	-2,71	PBJ	
4.01.03.2.04	Meningkatnya Peran Koordinasi,	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber	100	%	133														EKBANG SDA	
		Jumlah rekomendasi kebijakan Sumber Daya A	15	ebijaka	5				33	33,33	KEGIAT	0	100	33,33%	145.955.000	25.383.650	17,39	15,94	EKBANG SDA	
4.01.03.2.04.0001	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronis	4	Dok	1				1	25,00	KEGIAT	0	25	4,00%	50.000.000	1.148.250	2,30	22,70	EKBANG SDA	

Kode	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Perkembangan Realisasi				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Maret	%		
4.01.03.2.04.0002	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisas	2	Dok	0				0	0,00	KEGIAT	0	10	0,00%	50.000.000	1.260.000	2,52	-2,52	EKBANG SDA
4.01.03.2.04.0003	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisas	2	Dok	0				0	0,00	KEGIAT	0	10	0,00%	45.955.000	22.975.400	50,00	-50,00	EKBANG SDA
<b>RATA-RATA/ TOTAL</b>									<b>20,76</b>					#####					

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Realisasi-Kinerja-SetdaKH>

Keterangan Warna:

- Tidak Mencapai Target/ menjadi bahan evaluasi
- Melebihi Target

Putussibau, April 2024  
 Sekretaris Daerah  
 Kabupaten Kapuas Hulu,

**Drs. H. Mohd. Zaini, M.M.**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19650910 199303 1 011

FOTO-FOTO





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**SEKRETARIAT DAERAH**

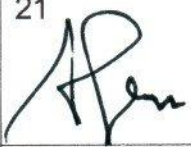
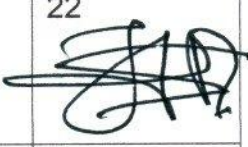

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716,  
 Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397

Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

**DAFTAR HADIR**

Hari/ Tanggal : Jum'at, 26 APRIL 2024  
 Pukul : 08:30  
 Tempat : KUANG RAPAT BUPATI  
 Agenda : KAPAT BAWALWASI FINBEKA TRIWULAH I TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	MOHD. Zaini	Sekda	1	2
2	Triwati	Asisten 2		
3	Yulia	Asisten 3	3	4
4	Budi Prasetyo	Kabag Ekspansi		
5	Hias Kinson	Kabag Korm	5	6
6	Hermanus.S	Kabag Tapem		
7	Yovinus Riady	Kabag Hukum	7	8
8	Andreas Amundoko	Kabag Prokopim		
9	Hendrikus Hen	Per. Per UU	9	10
10	Y. Surtan	Kabag Bagan		
11	Iwan Setiawan	Asisten Per	11	12
12	Wahid Fathoni J.	Kabag Pj		
13	Maria Yeni Murni	Staf	13	14
14	Sinta Savitriani	- 11 -		
15	Lusia Puspita Purnamasari	staf Perku	15	16
16	M. Rohan	- 11 -		
17	Vilaria Laudra A	- 11 -	17	18
18	Lily Pebrianti	- 11 -		
19	Supriawan Hery	- 11 -	19	20
20	Willidayanto	- 11 -		

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
21	A. Fania	Kabag UU	21 	22 
22	Adianus Iwanto	Staf Perbek		
23	Fransisca	— " —	23 	24
24				
25			25	26
26				
27			27	28
28				
29			29	30
30				
31			31	32
32				
33			33	34
34				
35			35	36
36				
37			37	38
38				
39			39	40
40				
41			41	42
42				
43			43	44
44				
45			45	46
46				



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716,  
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397

Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: [setda@kapuashulukab.go.id](mailto:setda@kapuashulukab.go.id)

Nomor : 900/84/SETDA/PERKEU Putussibau, 23 April 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Yth. Daftar Terlampir

di

Putussibau

Dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan Evaluasi Kinerja Triwulan I pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Jum'at, 26 April 2024

Waktu : 08.30 WIB-selesai

Tempat : Ruang Rapat Bupati

Acara : Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Adapun yang menjadi Bahan Evaluasi dapat dilihat pada Link: <https://bit.ly/Monitoring-Kinerja> pada Triwulan I. Mohon setiap bagian menyiapkan tanggapan berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja tersebut yang tidak mencapai target dan atau melebihi target serta yang Tingkat Efisiensi di bawah 0 (Nol) yang ditandai dengan warna kuning dan warna merah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,  
  
Mohd. Zaini



## Daftar Penerima Surat

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
3. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
7. Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
9. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
11. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu